

Sanksi Pencabutan KJP Plus Tidak Permanen

JAKARTA (IM) - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo mengemukakan sanksi pencabutan bantuan pendidikan berupa KJP Plus bagi peserta didik yang melakukan kenakalan tidak permanen.

Menurut dia, dana bantuan pendidikan tersebut bisa diberikan kembali setelah dipastikan peserta didik yang bersangkutan telah memperbaiki diri setelah mendapat pembinaan dari sekolah. "Tidak (permanen). Hukuman kita bukan untuk apa ya. Hukuman itu diberikan dalam rangka efek jera dan memberikan pembinaan. Jadi dibina oleh sekolah. Setelah sekolah melihat ada perbaikan sikap, (KJP Plus) bisa diajukan kembali," ujar Purwosusilo, Minggu (14/1) saat dikonfirmasi.

Pencabutan KJP Plus bagi peserta didik yang melakukan perilaku negatif seperti merokok, membolos, hingga tawuran pun diajukan oleh sekolah. Prosesnya pun sudah melalui klarifikasi terhadap peserta didik serta orangtua atau wali murid.

"Harus ada pembuktian kan. *Bener nggak* dia melakukan itu. Kalau benar, lalu sekolah berdialog menyampaikan kepada orangtua bahwa anak ini melakukan dan sanksinya ini. Jadi orangtua pun tahu," jelasnya.

Lamanya durasi pencabutan KJP Plus bergantung dari derajat sanksi yang diberikan oleh sekolah. "Kalau merokok misalnya itu enam bulan. Kalau tawuran misalnya satu tahun," sambungnya.

Untuk pengajuan kembali bagi peserta didik yang sudah memperbaiki diri dan berhasil dibina prosesnya diajukan oleh sekolah. "Pihak sekolah akan mengevaluasi apakah yang bersangkutan sudah berubah, sudah jera. Kalau sudah, nanti diajukan lagi. Itu bisa. Tapi kalau belum. Ternyata melakukan lagi, ya tidak diajukan lagi," imbuhnya.

Sementara itu, pada November 2023 lalu, Pemprov DKI telah mencairkan dana KJP Plus tahap 2 untuk periode Juli-Desember 2023. Kemudian, ada pula pencairan susulan yang dilakukan pada awal Januari 2024.

Purwosusilo mengatakan, untuk pencairan susulan adalah bagi peserta baru KJP Plus. Di sisi lain, ia pun meminta para peserta didik yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi belum menerima pencairan dana KJP Plus agar bersabar.

"Alokasi APBD ada, sudah masuk ke Bank DKI. Setelah pergub (peraturan gubernur) ditandatangani itu otomatis cair. Tapi kalau belum biasanya ada masalah di distribusi buku rekening dan kartu ATM Bank DKI. Jadi sabar. Kalau uangnya sudah ada," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI melakukan pencabutan bantuan KJP Plus pada 2023 sebanyak 492 orang yang tersebar pada setiap jenjang pendidikan (SD-SMA). Pencabutan atau pembatalan pemberian dana KJP Plus tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021. Di dalam beleid tersebut terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus.

Berikut ini rincian kasus penyebab pencabutan KJP Plus siswa: Tindakan asusila sebanyak: 3 orang Berkelahi sebanyak: 1 orang Berkendara membawa senjata tajam sebanyak: 7 orang Lulus sebanyak: 5 orang Melakukan bullying/tindak kekerasan/pelecehan sebanyak: 27 orang Mencuri sebanyak: 5 orang Menggadaikan ATM KJP sebanyak: 79 orang Mengundurkan diri dari KJP/menikah sebanyak: 39 orang Meninggal sebanyak: 3 orang Menolak KJP sebanyak: 1 orang Merokok sebanyak: 103 orang Minum Miras/ Narkoba sebanyak: 8 orang. ● yan

GEDUNG MEGAH DAN BANYAK FASILITASNYA Depok Dirikan SMPN Olahraga Pertama

DEPOK (IM) - Wali Kota Depok, Mohammad Idris meresmikan gedung sekolah olahraga yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 30 Depok.

Gedung SMPN 30 Depok yang cukup megah beralamat di Jalan Gelatik Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

SMPN 30 Depok merupakan sekolah olahraga pertama di Kota Depok. Untuk mencetak atlet dengan fasilitas yang berbeda dari sekolah lainnya, terutama fasilitas olahraga.

Ada 4 fasilitas lapangan olahraga dan 1 lapangan sepakbola yang berdekatan dengan SMPN 30 Depok yakni

1. Lapangan Voli. 2. Lapangan Badminton. 3. Lapangan Basket. 4. Lapangan Futsal dan 5. Lapangan Sepakbola di Stadion Merpati.

Hal ini sejalan dengan peminatan olahraga yang digeluti siswa di antaranya sepak bola, basket, voli, futsal, badminton, karate, taekwondo, silat dan renang.

"Sistem pembelajaran di SMPN 30 porsinya lebih banyak peminatan olahraga yang mereka tekuni, tapi

tetap belajar kurikulum pengetahuan umum juga," ujar Kepala Sekolah (Kepsek), Agus Prasetyo, dalam keterangan yang diterima, kemarin.

Gedung sekolah yang megah dua lantai ini berada di lahan seluas kurang lebih 3.500 meter persegi, memiliki 18 ruang kelas baru (RKB). Terdiri dari enam kelas VII, lima kelas VIII dan empat kelas IX.

Selain itu juga ada ruang multimedia, ruang Laboratorium IPA, ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS), ruang OSIS, ruang Bimbingan Konseling, ruang tata usaha, ruang guru, ruang Kepsek, perpustakaan, kantin dan mushola.

Menurut Agus, aktivitas kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di SMPN 30 Depok yang baru ini merupakan idaman, selama ini diharapkan para civitas sekolah.

Sebab, sejak berdiri tahun 2021 sistem KBM menggunakan gedung SD Negeri Depok Baru 5 dan SD Negeri Depok Jaya 5.

"Alhamdulillah bangunan gedungnya sesuai harapan kami, mulai dari ruang kelas dan sarana prasarana lainnya," terangnya. ● yan

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT Borneo Lestari Cemerlang, berkendudukan di Kota Samarinda ("Perseroan"), mengumumkan bahwa proses pengambilalihan saham-saham dalam Perseroan telah selesai dilaksanakan. Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 15/01/2024
Direksi Perseroan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



RAKOR PERSIAPAN KAMPANYE METODE RAPAT UMUM

Komisioner KPU, August Mellaz (tengah) didampingi Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri) dan Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima (kanan) memimpin rapat koordinasi dengan parpol dan tim capres-cawapres di Ruang Sidang Utama KPU, Jakarta, Minggu (14/1). Rakor tersebut untuk membahas persiapan pelaksanaan kampanye jelang pemilu 2024 dengan metode rapat umum yang akan digelar pada 21 Januari-10 Februari 2024

PANGKAS ANGGARAN JALUR SEPEDA

B2W Indonesia akan Gugat Heru Budi Hartono ke PTUN

B2W Indonesia menganggap sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditargetkan hingga 2023. Mereka melihat dari sisi penganggaran dan perlakuan jalur sepeda kurang diprioritaskan di masa pemerintahan Pj Gubernur Heru Budi.

"Untuk gugatan sedang tahap upaya administratif, atas saran dari kuasa hukum," ujarnya saat dihubungi, Minggu (14/1).

B2W Indonesia menganggap sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditargetkan hingga 2023. Mereka

melihat dari sisi penganggaran dan perlakuan jalur sepeda kurang diprioritaskan di masa pemerintahan Pj Gubernur Heru Budi.

"Fahmi menyebut gugatan ini juga memiliki konsekuensi hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun gugatan masih disusun tim hukum B2W Indonesia, yaitu Amar Law-firm.

"Pertimbangan konsekuensinya permohonan maaf, administratif, dan bisa penggantian materil," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa materi dalam gugatan mulai dari November 2022 soal pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda. Semula dianggarkan dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2023 sebesar Rp 38 miliar, kemudian di-

sulkan untuk dinolkan.

Pada April 2023, dalam rekayasa lalu lintas di pertigaan Santa, Jakarta Selatan, pedestrian dan jalur sepeda dibongkar. Masalah itu sempat ramai disorot lantaran kendaraan bermotor kembali melintas.

"Mei 2023, 18 ruas jalan ibu kota diperintahkan diaspal ulang, dengan dalih menyambut KTT ASEAN, tetapi dengan menutup jalur sepeda yang sudah ada dan tidak dikembalikan lagi seperti semula," kata Fahmi.

Pada Oktober 2023, Dinas Perhubungan membongkar stick cone pembatas jalur

sepeda di 13 ruas. Dalih pembongkaran adalah membahayakan pengendara lain.

Dia juga menyoroti draft pembahasan Raperda APBD DKI 2024.

"Pembangunan jalur sepeda sebesar Rp 4.513.936.931 masuk dalam anggaran pengurangan atau pengalihan, dan tidak dianggarkan kembali," ucapnya.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, gugatan tersebut belum terdaftar. Namun B2W Indonesia melalui Instagram resmi @b2w_indonesia sudah mengumumkan upaya langkah hukum ini. ● yan

Spanduk Pemilu Bergambar Heru Budi Disarankan Diganti yang Lebih Netral

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rani Mauliani menyarankan stiker dan spanduk imbauan Pemilu 2024 bergambar Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diganti.

"Ya, saran saya mungkin sebaiknya imbauan tersebut lebih arif dan bijaksana lagi dalam *packaging* (pengemasan) penyampaiannya," kata Rani kepada pers di Jakarta, Sabtu.

Politikus Partai Gerindra itu menyarankan penggantian gambar Heru Budi dengan yang lebih netral. "Bila mau diganti dengan gambar media yang lebih netral tapi tersisip nama Pj di dalam kata-katanya juga bisa sampai kan pesannya," kata dia.

Rani mengatakan, di masa kampanye ini, segalanya perlu dilakukan dengan cermat dan bijaksana.

Hal itu mengingat stiker bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!" disertai foto Heru memakai seragam putih sambil mengepalkan tangan yang terpampang di pintu Halte TransJakarta kini menjadi sorotan.

"Memang serba sulit ya di masa kampanye saat ini semua jadi serba sensitif, belum lagi tingkat kepo dan baper sangat tinggi," ujar Rani.

Menurut Rani, masyarakat seharusnya melihat isi pesan dari stiker imbauan Heru tersebut, yakni mengajak masyarakat Jakarta agar menggunakan hak pilihnya dengan baik dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lancar, aman dan damai.

Dia mengatakan, Heru sebagai pimpinan wilayah Jakarta memang sudah sewajarnya memberikan imbauan yang menyangkut keamanan, ketertiban dan kedamaian Jakarta. Rani menuturkan saat ini Heru bukanlah peserta

Pemilu 2024 seperti caleg ataupun calon presiden dan calon wakil presiden.

Rani menilai Heru sosok pekerja yang fokus pada persoalan yang dialami warganya. Sebagai contoh penataan transportasi di Jakarta dengan memperluas kehadiran angkutan umum.

"Sejauh ini *concern* beliau memang salah satunya pada transportasi umum. Hal tersebut berkaitan dengan sudah dilaksanakannya *ground-breaking* LRT Jakarta beberapa waktu lalu," ujar Rani.

Sebelumnya, Manajemen PT TransJakarta menjelaskan pemasangan stiker Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di sejumlah halte TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai.

"Stiker sudah kami pasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024, ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo di Jakarta, Kamis.

Wibowo menyebutkan penempatan stiker tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing halte.

Tak hanya di halte TransJakarta, spanduk imbauan Pemilu 2024 bergambar Heru Budi juga terpasang di banyak tempat. ● yan

Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar Bagi Warga Umum

JAKARTA (IM) - Vaksin covid-19 berbayar sudah berlaku di DKI Jakarta. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Lies Dwi Oktavia menyatakan, vaksin covid-19 sama halnya dengan vaksin pilihan lainnya dapat ditemukan di rumah sakit (RS).

Puskesmas, lanjutnya, menyediakan vaksin covid-19 secara gratis hanya untuk warga yang termasuk dalam kriteria kelompok berisiko tinggi yang ditentukan Kementerian Kesehatan RI.

"Ya sudah mulai berlaku berbayar. Sama halnya seperti kita mau vaksin flu atau vaksin lainnya yang bukan vaksinasi dasar. Itu

bisa ke RS. Kalau puskesmas hanya untuk warga yang masuk kriteria gratis," tutur Lies saat dihubungi, Minggu (14/1).

Warga yang mendapatkan pengecualian vaksin covid-19 berbayar, antara lain tenaga kesehatan, lansia, orang dewasa dengan penyakit komorbid, ibu hamil, dan penderita autoimun.

Sementara itu, untuk anak-anak berusia 6 tahun ke atas sudah bisa mendapatkan vaksin covid-19 seperti yang sudah pernah diprogramkan saat pandemi covid-19 berlangsung pada 2021. Namun, saat ini ketersediaan jenis vaksin covid-19 bagi anak-anak usia di atas 6 tahun masih harus

dipastikan terlebih dulu.

"Kan kalau untuk anak-anak itu vaksinya hanya merek tertentu ya. Jadi harus dipastikan dulu di RS yang dituju stoknya ada atau tidak. Kalau ada, silakan memvaksin anaknya," jelas Lies.

Ia pun mengimbau bagi warga untuk melakukan vaksinasi covid-19. Meskipun tidak diwajibkan, vaksin covid-19 dapat mencegah perburukan gejala terutama pada lansia serta warga dengan penyakit komorbid.

"Mutasi virusnya akan tetap ada karena memang itulah sifat virus. Yang kita harapkan adalah tidak muncul varian yang seperti Delta yang terjadi di 2020," tutupnya. ● yan



KONPERS TIMNAS IRAK JELANG LAWAN INDONESIA

Pelatih Timnas Irak Jesus Casas (kiri) bersama Kapten Timnas Irak Osama Rashid (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat melakukan konferensi pers di Main Media Centre, Doha, Qatar, Minggu (14/1). Timnas Irak akan menghadapi Timnas Indonesia dalam pertandingan perdana group D Piala Asia 2023 di Qatar, hari ini Senin (15/1).

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 26 Desember 2023 yang telah dinyatakan dalam akta nomor 26 tertanggal 27 Desember 2023, dibuat dihadapan KIRANA (VYMINERVA WILAMARTA, SH, LL.M., Notaris di Jakarta. Para Pemegang Saham PT. HOTEL TALAGASARI PERMAI, berkendudukan di Kota Bandung, (Perseroan) telah memutuskan untuk menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan, yang semula masing-masing sebesar Rp. 156.000.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah), yang penyetorannya dilakukan dengan cara mengkompensasikan tagihan para pemegang saham terhadap Perseroan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Bandung, 15 Januari 2024. PT. HOTEL TALAGASARI PERMAI Direksi